

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Traveling dan industri pariwisata saat ini sedang tumbuh dengan pesat dan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian dunia. Pada tahun 2013, kontribusi ekonomi dari industri perjalanan dan wisata global tercatat sebesar 6,990.3 Milyar USD (atau hampir mencapai 7 triliun dolar USD). Selama tahun 2013, pertumbuhan kedatangan wisatawan global tercatat 5%. UNWTO mencatat bahwa pertumbuhan dan permintaan wisatawan internasional sangat tinggi untuk Asia Pasific (diatas 6%), Afrika (diatas 6%) dan Eropa (diatas 6%). UNWTO memperkirakan bahwa pada masa mendatang industri pariwisata akan semakin cerah dan mewarnai ekonomi dunia (Swarbroke and Horner. 2001 Gouyon et al., 2010, UNWTO, 2014).

Di Indonesia, sektor pariwisata saat ini menunjukkan peran yang semakin penting dalam pendapatan devisa negara dan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat disekitar daerah wisata. Kontribusi PDB pariwisata pada tahun 2013 mencapai Rp.347,35 triliun, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang jumlahnya hanya 326,33 triliun. Sementara untuk ekonomi kreatif kontribusinya terhadap PDB mencapai Rp.641,82 triliun naik dari tahun 2012 (Rp.578,76 triliun). Penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 mencapai 10,18 juta orang, meningkat dari tahun 2012 (9,41 juta). Selain dalam aspek ekonomi, pariwisata dilaporkan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (BPS, 2014). Kegiatan kepariwisataan di suatu daerah mampu merangsang pembangunan infrastruktur penting bagi kegiatan dan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Sebagai industri yang melibatkan banyak sektor terkait, kegiatan kepariwisataan di suatu daerah menimbulkan berbagai dampak positif. Pariwisata dengan demikian mempunyai kontribusi strategis dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Sektor pariwisata saat ini telah dipertimbangkan sebagai salah satu sektor strategis dalam meningkatkan penerimaan daerah, serta sebagai sector yang dapat menyediakan berbagai peluang usaha baru di bidang jasa pariwisata dan lapangan

pekerjaan. Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan potensi sumberdaya alam dan budaya yang sangat melimpah sebagai bagian penting dalam industri pariwisata. Provinsi Jawa Timur juga telah didukung oleh sarana, prasarana dan jaringan infrastuktur yang terus dikembangkan untuk mendukung industri pariwisata daerah yang berdaya saing. Dalam konteks keruangan, Provinsi Jawa Timur adalah satu kesatuan utuh dari destinasi wisata yang harus dikelola secara sinergis, dengan mempertimbangkan seluruh potensi utama dan pendukung dalam perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan pembangunan wisata di Jawa timur. Dengan demikian, dalam konteks kebijakan, peran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi sangat penting dalam mengkoordinasikan kerjasama antar pihak dalam menciptakan iklim dan produk-produk wisata Jawa Timur yang berdaya saing (Hakim and Nakagoshi, 2008).

Pada konteks kebijakan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai beberapa wewenang untuk bidang pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terutama dalam pengelolaan kawasan strategis sekaligus destinasi pariwisata provinsi. Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) adalah destinasi pariwisata yang berskala provinsi. Sedangkan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan potensi pariwisata yang utama atau memiliki potensi untuk pengembangan potensi pariwisata yang memiliki satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA) daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Keberadaan DPP dan KSPP ini tidak bisa dilepaskan dari kawasan pengembangan pariwisata Provinsi (KPPP). KPPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataanya serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. DPP, KSPP, maupun KPPP ini didapat dari perwilayahan pembangunan kepariwisataan perwilayahan ini tentu memiliki batas yang telah ditetapkan untuk membatasi wilayah perencanaan rencana detail pembangunan ketiga komponen tersebut.

Pembangunan DPP ini merupakan upaya mewujudkan rencana pembangunan yang meliputi perwilayahan pembangunan DPP, daya tarik wisata, aksesibilitas pariwisata, prasarana dan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata serta pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sekaligus pengembangan investasi dibidang pariwisata. Dalam konteks perwilayahan pembangunan DPP inilah kerja sama antardaerah perlu dilakukan ini mengingat KPPP maupun KSPP mencakup area tertentu yang terdiri dari beberapa kabupaten atau kota yang memiliki tema produk wisata khusus yang dijadikan sebagai ciri khas kawasan tersebut.

Jumlah wisatawan mancanegara ke Jawa Timur melalui bandara juanda dan over land tahun 2013 mencapai 300.090 orang atau naik 11,47 % di banding tahun 2012 sebesar 269.943,- orang, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara (Wisnus) ke Jawa Timur pada tahun 2013 berjumlah 39.663.995,- jumlah tersebut naik 19,38 % di bandingkan tahun 2012 yang jumlahnya 33.224.659,- orang. Pertumbuhan wisatawan ini memberikan rangsangan bagi peluang industri perhotelan, jasa wisata, dan anekaragam kegiatan ekonomi lainnya di Jawa Timur. Dalam kontek pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional, kontribusi ini sangat penting bagi perekonomian masyarakat di Jawa Timur (Hakim and Nakagoshi, 2008; BPS-Jatim, 2013).

Peran kerjasama dari sebuah kawasan wisata akan sangat penting karena mempunyai berbagai peran strategis, terutama adalah saling melengkapi dan mensinergikan kekuatan yang dimiliki masing-masing daerah serta menutup kelemahan suatu daerah dengan kelebihan daerah lainnya. Kerjasama akan sangat penting dalam mendorong efisiensi sumebrdya dalam menciptakan destinasi yang berdaya saing.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang mendesak untuk segera dipecahkan, terutama dalam mengoptimalisasikan seluruh potensi daerah yang ada dalam kontek kerjasama antar pemerintah daerah. Dengan demikian, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa saja produk wisata di beberapa daerah Jatim yang bias dijadikan sebagai ciri khas kawasan
- b. Bagaimana kondisi fasilitas dan prasarana umum di masing-masingdaerah yang berpotensi dijadikan sebagai KPPP dan KSPP
- c. Bagaimana kesiapan masyarakat di masing-masing daerah tersebut terkait potensi pembentukan DPP
- d. Bagaimana model kerja sama antar Pemkab/kot yang dapat dikembangkan dalam rangka pembentukan DPP Jatim

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Produk wisata di beberapa daerah Jatim yang bisa dijadikan sebagai ciri khas kawasan.
- b. Mengetahui kondisi fasilitas dan prasarana umum di masing-masing daerah yang berpotensi dijadikan sebagai KPPP dan KSPP
- c. Mengetahui kesiapan masyarakat di masing-masing daerah tersebut terkait potensi pembentukan DPP
- d. Menyusun model kerja sama antar-Pemkab/kot yang dapat dikembangkan dalam rangka pembentukan DPP Jatim

1.4. Hasil yang Diharapkan.

- a. Diketuinya produk wisata di beberapa daerah di Jatim yang bisa dijadikan sebagai ciri khas Kawasan
- b. Diketuinya kondisi fasilitas dan prasarana umum di masing-masin daerah yang berpotensi dijadikan sebagai KPPP dan KSPP
- c. Diketuinya kesiapan masyarakat di masing-masing daerah tersebut terkait potensi pembentukan DPP
- d. Tersusnya model kerja sama antar Pemkab/kot yang dapat dikembangkan dalam rangka pembentukan DPP Jatim.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

1. Identifikasi Potensi Wisata
2. Kesiapan Masyarakat dalam DPP
3. Kerjasama antardaerah kabupaten atau kota